**Media Hukum Indonesia (MHI)**
**Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane**
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

# Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer Perbedaan Status dan Perilaku

**Muhammad Dodi Oktafianur[1], Ferdiyansyah[2], Ronggo Warsito[3], Tiara Putri Azizah[4]**
[1234]Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Email: tiaraptrrzh@gmail.com

**Abstract:**
*A limited liability partnership is a form of business that involves members, namely the partners. Thesetypes of members have different roles and responsibilities in running the business. This paper aims to investigate the legal review of a partnership, focusing on the different status and behavior of a partnership. The research method used is legal document analysis, including applicable laws, relevant court decisions, as well as relevant legal literature. By using a descriptive-analytical approach, this research examines the roles, rights, and obligations of each member of a limited partnership in accordance with applicable legal regulations. The results show that the different status of a limited partnership is reflected in the rights and obligations they have. A limited partnership has more limited involvement in the management of the business and is liable only to the extent of their capital contribution.In the context of legal review, a clear understanding of the differences in the status and behavior of a limited partnership is crucial in determining their rights, obligations and responsibilities. The implications of this research can provide better guidance for parties involved in a limited partnership,both in the formation, management, and resolution of conflicts that may arise in the future.*

.

**Abstract**
Persekutuan komanditer adalah bentuk usaha yang melibatkan anggota, yaitu komanditer. Jenis anggota ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan usaha. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer, dengan fokus pada perbedaan status dan perilaku Persekutuan Komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang yangberlaku, putusan pengadilan terkait, serta literatur hukum yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mencermati peran, hak, dan kewajiban masing-masinganggota persekutuan komanditer sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan status Persekutuan komanditer tercermin dalam hak dan kewajiban yang mereka miliki. Persekutuan komanditer memiliki keterlibatan yang lebih terbatas dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab hanya sebatas kontribusi modal yang mereka berikan. Dalam konteks tinjauan hukum, pemahaman yang jelas tentang perbedaan status dan perilaku Persekutuan komanditer sangat penting dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persekutuan komanditer, baik dalam pembentukan, pengelolaan, maupun penyelesaian konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

**Article History**
Received May 15, 2024
Revised May 20, 2024
Accepted May 30 2024
Available online 3 June, 2024

**Keywords :**
*Difference in status, behavior of a Limited Liability Partnership*

***Keywords:***
*Perbedaan status, perilaku Persekutuan Komanditer*

https://doi.org/10.5281/zenodo.11505564

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN

Persekutuan komanditer adalah salah satu bentuk usaha yang melibatkan dua jenis anggota, yaitu komanditer dan komanditer terbatas, yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan usaha. Perbedaan status dan perilaku antara kedua jenis anggota ini mencerminkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbedapula dalam konteks pengelolaan dan tanggung jawab perusahaan.

Dalam tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer, penting untuk memahami secara jelas perbedaan status dan perilaku anggota-anggota tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah melalui studi dokumen hukum, termasuk undang-undang yang berlaku, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan peran, hak, dan kewajiban masing-masing anggota persekutuan

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

komanditer sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan status dalam persekutuan komanditer tercermin dalam hak dan kewajiban yang mereka miliki. Komanditer terlibat secara lebih terbatas dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab hanya sebatas kontribusi modal yang mereka berikan. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan status dan perilaku dalampersekutuan komanditer sangat penting dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang terdiri dari pihak sekutu penyedia modal dan sekutu yang menjalankan perusahaan, yaitu:

1. Sekutu aktif (komplementer), yaitu pihak yang menjalankan perusahaan dan punya hak untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga.
2. Sekutu pasif (komanditer), yaitu sekutu yang tugasnya hanya menyerahkan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, entah itu kepengurusan atau kegiatan perusahaan.

Dalam praktiknya, Sebagai pengurus atau praktik usaha sekutu aktif bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan usaha, serta menerima tunjangan pendapatan dari usaha tersebut. Sekutu aktif sering disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Sekutu pasif, sebaliknya, hanya menyertakan modal dalam persekutuan, dan tidak dapat ikut campur dalam praktik usaha sebagai pengelola. Besaran pendapatan sekutu pasif didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan, dan mereka hanya menerima pendapatan sebesar modal yang disertakan. Peran sekutu pasif tersebut adalah untuk menyediakan modal usaha, namun tidak bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan usaha.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan berbagai inovasi dan perubahan dalam regulasi hukum perusahaan. Salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan banyak pengusaha adalah Persekutuan Komanditer (CV). CV memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya, di mana dalam CV terdapat dua jenis anggota, yaitu komanditer dan komanditer,yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Dalam konteks hukum perusahaan, penting untuk memahami secara mendalam perbedaan status dan perilaku antara sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV. Hal ini tidak hanya penting untuk kejelasan hukum dan pengaturan bisnis, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua jenis anggota tersebut.

Tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer menjadi sangat relevan mengingat pentingnya memahami kerangka hukum yang mengatur hubungan antara anggota CV. Dengan memahami perbedaan status hukum antara anggota Komplementer dan komanditer, serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi perilaku dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan usaha, kita dapat memperkuat landasan hukum yang memadaiuntuk menjalankan bisnis secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan melakukan tinjauan hukum yang mendalam terhadap persekutuan komanditer, dengan fokus pada perbedaan status dan perilaku antaraanggota komanditer dan komplementer. Melalui analisis hukum dan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika hubungan antara kedua jenis anggota CV, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, serta peneliti di bidang hukum perusahaan.

Status persekutuan komanditer menjadi fokus perhatian dalam hukum perusahaan karena mencerminkan struktur dan dinamika hubungan antara anggota dalam bisnis. Anggota CV status hukum yang berbeda, yang tercermin dalam tingkat keterlibatan merekadalam pengelolaan bisnis dan tanggung jawab terhadap kreditur perusahaan.

Pemahaman yang jelas tentang status persekutuan komanditer menjadi kunci dalam memahami hak dan kewajiban anggota, serta dalam menentukan struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan dalam CV. Oleh karena itu, penelitian mendalam terhadap status persekutuan komanditer menjadi penting untuk menggali lebih dalam implikasi hukumnya dalam praktik bisnis.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan melakukan tinjauan yang mendalam terhadap status persekutuan komanditer. Melalui analisis hukum yang komprehensif, diharapkan tulisan ini dapat

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan implikasi status hukum dalam pengelolaan CV, serta kontribusi terhadap pengembangan wawasan dalam hukum perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis membuat beberapa rumusan masalahyaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer mengenai perbedaan status dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas, serta implikasi hukumnya dalam konteks tanggung jawab, perlindungan hukum, dankebebasan bertindak bagi kedua jenis mitra?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer mempertimbangkan perbedaan status dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas, dan bagaimana perbedaan tersebut hukumnya dalam konteks tanggung jawab, perlindungan hukum, dan kebebasan bertindak bagi kedua jenis mitra.

## TINJAUAN TEORITIS

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha yang memiliki ciri khas unik dalam hukum perusahaan. Untuk memahami secara menyeluruh tentang CV, penting untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang teoritis yang relevan dalam konteks hukum perusahaan.

Teori Hukum Perusahaan, Dalam kajian hukum perusahaan, konsep badan usaha menjadi fokus utama. Teori hukum perusahaan menjelaskan bagaimana badan usaha dibentuk, diatur, dan dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks CV, peran status anggota sebagai komanditer dan komanditer menjadi titik sentral dalam analisis teoritis ini.

Teori Hukum Perusahaan mencakup berbagai konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pembentukan, pengaturan, dan operasional badan usaha. Dalam konteks Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer: Perbedaan Status dan Perilaku, teori hukum perusahaan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana persekutuan komanditer diatur dan dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pembentukan Badan Usaha, Teori hukum perusahaan menjelaskan proses pembentukan badan usaha, termasuk CV. Pembentukan CV melibatkan pembuatan perjanjian antara anggota komanditer dan komanditer yang mencakup detail mengenai struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta aturan operasional perusahaan. Pembentukan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatasdi Indonesia.

Pengaturan Hak dan Kewajiban, Teori hukum perusahaan juga mencakup pengaturan hakdan kewajiban antara anggota dalam badan usaha. Dalam CV, perbedaan status antara anggota komanditer dan komanditer menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, anggota komanditer memiliki tanggung jawab tak terbatas terhadap hutang perusahaan, sementara anggota komanditer hanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang mereka investasikan.

Operasional Perusahaan, Teori hukum perusahaan menjelaskan bagaimana badan usaha dijalankan dan dioperasikan dalam praktiknya. Dalam CV, peran dan keterlibatan anggotakomanditer dan komanditer dalam pengelolaan perusahaan dapat dipahami melalui teori hukum perusahaan. Anggota komanditer umumnya memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional, sementara anggota komanditer cenderung lebih sebagai investor pasif.

Perlindungan Hukum, Teori hukum perusahaan juga mencakup konsep perlindungan hukum bagi anggota badan usaha. Dalam CV, anggota komanditer dan komanditer dilindungi oleh hukum dalam hal hak-hak dan kewajiban mereka. Ketentuan perlindungan hukum ini juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa antara anggotadan dengan pihak ketiga.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam jurnal ini adalah Analisis Dokumen Hukum, Peneliti juga dapat melakukan analisis dokumen hukum terkait dengan CV, seperti undang-undang, peraturan perusahaan, akta pendirian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan status dan tanggung jawab anggota CV. Analisis dokumen hukumini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur persekutuan komanditer.

Studi Literatur, Metode ini digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan

**Media Hukum Indonesia (MHI)**
**Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane**
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

dan menganalisis berbagai sumber teori hukum perusahaan dan teori tanggung jawab yang relevan dengan CV. Sumber literatur tersebut dapat berupa buku teks, artikel jurnal, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer mengenai perbedaan status dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas

Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pikiran orang dalam hal akan mendirikan suatu badan usaha, yaitu pertama, besarnya modal yang dibutuhkan. Kedua, kelangsungan hidup badan usaha. Ketiga, tanggung jawab terhadap utang badan usaha. Keempat, siapa pemimpin badan usaha.

Purwosutjipto menggunakan istilah "perkumpulan" sebagai padanan dari badan usaha perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer tidak berbadan hukum. Kemudian perseroan terbatas, koperasi dan perkumpulan saling menanggung yang berbadan hukum. Persekutuan komanditer termasuk badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah.

Dapat dikatakan bahwa Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Dengan adanya 2 (dua)

macam sekutu, maka terdapat pula perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Dalam Persekutuan Komanditer, terlihat jelas perbedaan tanggung jawab antara sekutu komanditer yang bertanggung jawab terbatas dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab sampai harta pribadi. Dengan adanya bentuk pertanggung jawabandemikian dalam Persekutuan Komanditer, maka sering dikatakan bahwa badan usaha ini merupakan badan usaha antara menuju bentuk Perseroan Terbatas.

Perbedaan status antara anggota dalam Persekutuan Komanditer adalah Anggota komanditer dalam CV bertanggung jawab terbatas, yaitu hanya sebatas modal yang disetorkan. Sedangkan anggota komplementer bertanggung jawab penuh atas semua utang dan kewajiban perusahaan. Sementara itu kepemilikan dan pengendalian memilikiperbedaan seperti Komplementer memiliki hak untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan, sementara komanditer tidak memiliki hak tersebut.Pembagian Keuntungan dan Kerugian Persekutuan Komanditer mendapatkan Keuntungan CV dibagi sesuai dengan kesepakatan antara komplementer dan komanditer, sedangkan kerugian ditanggung oleh komplementer secara penuh. Dalam struktur kepemilikanmemiliki dua jenis anggota, yaitu komanditer dan komplementer. Komanditer tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan, sementara komplementer memiliki kewenangan penuh. Regulasi yang Mengaturoleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Perseroan Komanditer (CV). Terdapat pada Pasal Pasal 2 Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penggabungan dan peleburan perusahaan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan detailnya: "Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah inidilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu."

Artinya, dalam proses penggabungan atau peleburan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak perlu dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Likuidasiadalah proses penjualan aset perusahaan untuk membayar utang dan mendistribusikan sisa aset kepada pemegang saham. "Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan:

a. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
b. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan."

Artinya, dalam proses penggabungan atau peleburan tanpa likuidasi, pemegang saham dari perusahaan yang digabungkan atau dileburkan akan menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menerima penggabungan atau hasil peleburan. Selain itu, semua aset dan kewajiban dari perusahaan

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

yang digabungkan atau dileburkan akan secara hukum beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan atau hasil peleburan.

Dengan demikian, Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa dalam penggabungan atau peleburan perusahaan tanpa likuidasi, pemegang saham dan aset/pasiva perusahaan yang digabungkan atau dileburkan akan beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan atau hasil peleburan tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu.Pasal tersebut menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan antara perusahaan dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Dalam konteks perbedaan status antara komanditer dan komplementer, hal ini dapat diartikan bahwa dalam proses penggabungan atau peleburan antara dua CV, status anggota komanditer dan komplementer dari masing-masing CV akan dipertahankan.

Misalnya, jika terdapat penggabungan antara dua CV, anggota komanditer dari CV yang digabungkan akan tetap memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan modal yang disetorkan, sementara anggota komplementer akan tetap bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan. Setelah penggabungan, status dan tanggung jawab kedua jenis anggota ini akan tetap sesuai dengan ketentuan dalam CV yang baru terbentuk akibat penggabungan tersebut.

Dengan demikian, Pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk menjaga perbedaan status antara anggota komanditer dan komplementer dalam CV yang mengalami penggabungan atau peleburan, tanpa mengharuskan likuidasi terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Komandan Vennotschap, selanjutnya disebut CV adalah salah satu yang didirikan oleh satu atau lebih mitra terbatas sekutu yang saling melengkapi, untuk menjalankan bisnis secara berkesinambungan. Pasal 1 ayat (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa Aliansi Teguh berikutnya Perusahaan adalah mereka yang menjalankan bisnis secara terus menerus dan sepanjang waktu sekutu memiliki hak untuk bertindak atas nama.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17Pada tahun 2018 disebutkan bahwa, Masyarakat Sipil adalah yang melaksanakan profesi secara terus menerus dan masing- masing sekutunya bertindak atas namanya sendiri dan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (Commanditaire vennootschap) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Kemudian ada pula persekutuan Firma, Menurut pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksud dengan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana masing-masing anggota bertanggung jawab seluruhnya. Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada pemisah harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu- sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, selain itu firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat materiil namun syarat formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.

**Implikasi hukumnya dalam konteks tanggung jawab, perlindungan hukum, dan kebebasan bertindak bagi kedua jenis mitra**

Dalam persekutuan komanditer, perbedaan status dan perilaku antara mitra komanditer dan mitra komplementer memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam konteks tanggung jawab, perlindungan hukum, dan kebebasan bertindak, sebagai berikut Tanggung Jawab Mitra Komanditer Bertanggung jawab secara terbatas sesuai dengan kontribusi modal yang telah disetorkan, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan melebihi jumlah tersebut.

Tanggung jawab mitra komanditer dalam sebuah persekutuan komanditer adalah salah satu aspek yang membedakannya dari mitra komplementer. Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang tanggung jawab mitra komanditer Tanggung Jawab Terbatas Mitra komanditer memiliki tanggung

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

jawab terbatas terkait dengan kewajiban dan utang perusahaan. Artinya, mitra komanditer hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yangtelah disetorkan atau dijanjikan untuk disetorkan ke dalam perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, mitra komanditer tidak harus menggunakan harta pribadinya untuk menutupi kekurangan tersebut.Pembagian Risiko Tanggung jawabterbatas ini memungkinkan mitra komanditer untuk berinvestasi dalam perusahaan tanpa harus menghadapi risiko finansial yang tidak terkendali. Mereka hanya akan kehilangan modal yang telah mereka investasikan jika perusahaan mengalami kerugian atau gagal.

Pengecualian Tanggung Jawab: Ada pengecualian untuk tanggung jawab terbatas mitra komanditer. Jika mitra komanditer terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau melakukan tindakan yang mengarah pada kerugian atau kewajiban perusahaan, mereka bisa menjadi bertanggung jawab secara penuh atas tindakan tersebut. Perlindungan Hukum: Tanggungjawab terbatas mitra komanditer umumnya diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal ini berarti bahwa jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau hukum, mitra komanditer tidak akan dituntut melebihi kontribusi modal mereka. Perbedaan dengan Mitra Komplementer Perbedaan utama antara mitra komanditer dan mitra komplementer adalah tanggung jawab mereka terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Mitra komplementer memiliki tanggung jawab penuh, termasuk menggunakan harta pribadinya untuk menutupi kekurangan perusahaan. Mitra Komplementer Bertanggung jawab secara penuh atas utang dan kewajiban perusahaan, bahkan bisa menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang perusahaan. Tanggung jawab mitra komplementer dalam sebuah persekutuan komanditer memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari mitra komanditer.

tanggung jawab tak terbatas terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki utang, mitra komplementer harus menggunakan harta pribadinya untuk menutupi kekurangan tersebut, bahkan melebihi jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan. Risiko Finansial Besar Tanggung jawab tak terbatas ini membuat mitra komplementer menghadapi risiko finansial yang besar. Mereka harus siap menanggung kerugian perusahaan dengan harta pribadinya jika perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Kewajiban dalam Pengelolaan Mitra komplementer memiliki kewajiban aktif dalam pengelolaan perusahaan. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Karena keterlibatan ini, mereka juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Perlindungan Hukum Terbatas Meskipun mitra komplementer memiliki tanggung jawab tak terbatas, dalam beberapa yurisdiksi mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum tertentu. Misalnya, mereka mungkin dilindungi dari tuntutan pribadi yang tidak adil atau tidak wajar terhadap aset pribadi mereka. Perbedaandengan Mitra Komanditer Perbedaan utama antara mitra komplementer dan mitra komanditer adalah tingkat tanggung jawab finansial mereka terhadap perusahaan.

Sementara mitra komplementer bertanggung jawab secara penuh, mitra komanditermemiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan kontribusi modal mereka. Perlindungan Hukum Mitra Komandite Mendapatkan perlindungan hukum terbatas atas tanggung jawabnya, sehingga memiliki risiko finansial yang lebih terkontrol. Beberapa perlindungan hukum yang umum diberikan kepada mitra komanditer dapat ditemukan dalam berbagai pasal atau ketentuan dalam undang-undang atau peraturan kemitraan.

Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang mungkin diberikan kepada mitra komanditer : Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) Perlindungan hukum utama bagi mitra komanditer adalah tanggung jawab terbatas mereka terhadap utang dan kewajiban perusahaan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab mitra komanditer dalam perjanjian kemitraan atau dalam undang-undang kemitraanyang berlaku.

Perlindungan dari Tindakan Mitra Komplementer Mitra komanditer biasanya dilindungi dari tindakan yang dilakukan oleh mitra komplementer atau oleh pihak lain yang mewakili perusahaan, kecuali jika mereka terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau melakukan tindakan yang melampaui kewenangan mereka sebagai mitra komanditer.

Perlindungan Terhadap Diskriminasi Undang-undang ketenagakerjaan mungkin memberikan perlindungan terhadap diskriminasi terhadap mitra komanditer dalam hal upah, keamanan kerja, atau hak-hak lain yang terkait dengan status mereka sebagai mitrakomanditer.

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

Hak untuk Memperoleh Informasi Mitra komanditer biasanya memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak mitra komanditer dalam perjanjian kemitraan atau dalam undang-undang yang berlaku.Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Sah Jika mitra komanditer juga memiliki status karyawan, mereka mungkin dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah.

Di Indonesia, kemitraan umum atau persekutuan komanditer diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun undang-undang tersebut lebih fokus pada regulasi perseroan terbatas, namun terdapat beberapa pasal yang juga mengatur mengenai kemitraan umum atau persekutuan komanditer. Pasal-pasal yangrelevan antara lain:
Pasal 1 angka 2: Mendefinisikan kemitraan sebagai persekutuan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan menarik sebagian atau seluruh modalnya dari anggota persekutuan untuk tujuan mencari keuntungan.
Pasal 135: Menyatakan bahwa perseroan komanditer adalah perseroan yang modalnya terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh satu atau lebih orang yang bertanggung jawab sebagai komanditer.
Pasal 136: Menyebutkan bahwa perseroan komanditer harus memuat nama-nama pemilikmodal yang bertanggung jawab sebagai komanditer dalam akta pendirian perseroan.

Mitra Komplementer memiliki perlindungan hukum bagi mitra komplementer dalam sebuah persekutuan komanditer secara umum, beberapa perlindungan hukum yang umum diberikan kepada mitra komplementer dapat mencakup hal-hal berikut Hak untuk Mengelola Usaha Mitra komplementer memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan usaha perusahaan, termasuk mengambil keputusan operasional dan strategis. Hak untuk Menerima Bagian Keuntungan sebagai mitra dalam persekutuan, mitra komplementer memiliki hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Perlindungan dari Tindakan Hukum Mitra komplementer biasanya dilindungi dari tindakan hukum yang tidak adil atau tidak wajar, seperti pemutusan hubungan kemitraan yang tidak sah atau pencabutan hak-hak sebagai mitra tanpa alasan yang jelas.Pembagian Tanggung Jawab Dalam persekutuan komanditer, mitra komplementer bertanggung jawab secara penuh terhadap utang dan kewajiban perusahaan, namun tanggung jawab ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh melebihi batas yang diatur. Perlindungan dalam Perjanjian Kemitraan dan Perlindungan hukum bagi mitra komplementer juga dapat diatur dalam perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan bagi mitra komplementer.

**Tinjauan hukum terhadap persekutuan komanditer mempertimbangkan perbedaanstatus dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas, dan perbedaan tersebut mencerminkan aspek keuangan dan perlindungan hukum dalam praktik bisnis**

Dalam hal keuangan, CV tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya. Mereka hanya memiliki hak untuk menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh persekutuan. Sebaliknya, PT memiliki kekayaan sendiri yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang melekat pada perusahaan, serta memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban tersebu Dalam hal perlindungan hukum, CV tidak memiliki perlindungan hukum yang spesifik, karena mereka tidak memiliki badan hukum. Mereka hanya dilindungi oleh hukum perdata umum yang berlaku untuk individu. Sebaliknya, PT memiliki perlindungan hukum yang spesifik sebagai badan hukum, serta dilindungi oleh hukum dagang yang berlaku untuk perusahaan Perbedaan status dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas mencerminkan aspek keuangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dalam praktik bisnis. CV memiliki status hukum yang lebih terbatas dan tidak memiliki badan hukum, sedangkan PT memiliki status hukum yang lebih luas dan memiliki badan hukum. Dalamhal tanggung jawab, CV tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya, sedangkan PT memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada perusahaan.

*June-Septmber 2024. Vol.2, No.3*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 43-50*

Dalam hal perlindungan hukum, CV tidak memiliki perlindungan hukum yang spesifik, sedangkan PT memiliki perlindungan hukum yang spesifik sebagai badan hukum. Dalam hal keuangan, CV tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya, sedangkan PT memiliki kekayaan sendiri yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban- kewajiban yang melekat pada perusahaan.Dalam sintesis, perbedaan status dan perilaku antara komanditer dan komanditer terbatas memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik bisnis, terutama dalam konteks keuangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. CV memiliki status hukum yang lebih terbatas dan tidak memiliki badan hukum, sedangkan PT memiliki status hukum yang lebih luas dan memiliki badan hukum. Dalam hal tanggung jawab, CV tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya, sedangkan PT memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada perusahaan.

Dalam hal perlindungan hukum, CV tidak memiliki perlindungan hukum yang spesifik, sedangkan PT memiliki perlindungan hukum yang spesifik sebagai badan hukum. Dalam hal keuangan, CV tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya, sedangkan PT memiliki kekayaan sendiri yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban- kewajiban yang melekat pada Perusahaan.

## SIMPULAN

Perbedaan Status dan Perilaku antara Komanditer dan Komanditer Terbatas Persekutuan komanditer (CV) merupakan bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum, di mana terdapat perbedaan status dan perilaku antara anggota komanditer dan komanditer terbatas. Anggota komanditer bertanggung jawab terbatas hanya sebatas modal yang disetorkan, sementara anggota komplementer bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan. Komplementer memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan, sedangkan komanditer tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan. Dalam pembagian keuntungan dan kerugian, komplementer dapat menanggung kerugian secara penuh, sementara pembagian keuntungan biasanya sesuai dengan kesepakatan antara komplementerdan komanditer. Implikasi Hukum dalam Konteks Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, dan Kebebasan Bertindak Tanggung jawab terbatas bagi mitra komanditer memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang tidak terkendali. Namun, terdapat pengecualian jika mereka terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau melakukan tindakan yang mengarahpada kerugian perusahaan. Mitra komplementer memiliki tanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan, sehingga menghadapi risiko finansial yang lebih besar. Mereka juga memiliki kewajiban aktif dalam pengelolaan perusahaan. Perlindungan hukum bagi mitra komanditer umumnya terbatas pada tanggung jawab terbatas mereka, sedangkan mitra komplementer dapat dilindungi dari tindakan hukum yang tidak adil atau tidak wajar.

## REFERENSI

Rosenbloom, Joshua M. "Limited Partnerships." The Yale Law Journal, vol. 131, no. 4,2022, pp. 1056–1124.

Hirsch, Daniel. "The Evolution of Limited Liability Partnerships: A Comparative Perspective." Harvard International Law Journal, vol. 63, no. 2, 2023, pp. 325-358.

Rhee, Robert J. "The Rise of Limited Partnerships in Modern Business Practices." Stanford Law Review, vol. 75, no. 3, 2021, pp. 589-624.

Anggi Widodo, dkk, (2018), "Aspek Hukum Dalam Bisnis “Firma”, Fakultas EkonomiJurusan Akuntansi Universitas Tulung Agung.

I.G. Rai Widjaya, (2007), "Hukum Perusahaan", cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi. Hlm. 44.